

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Turki adalah negara yang berada diantara dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Memiliki letak geografis yang strategis membuat Turki dapat memainkan peran penting dan bertindak cermat di antara Asia, Eropa, Eurasia, Timur Tengah dan Afrika. Namun, sejak menjadi republik, Turki cenderung mengikuti kerangka nilai-nilai Eropa Barat walaupun tetap memasukkan kebudayaan Turki di dalamnya. Negara pertama Asia Tengah yang bermigrasi ke wilayah Anatolia dan Eropa. Turki pada awalnya menganut Samanisme dan ajaran Budha. Sesaat setelah terjadi Perang Talas pada Tahun 751 M akhirnya rakyat turki mayoritas memeluk agama islam. Turki sendiri turut menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam yang aktif mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Dibentuknya OKI sendiri didorong oleh keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam, khususnya setelah unsur zionis membakar bagian dari Masjid Suci Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 (Laylia, 2018).

Perpindahan masyarakat muslim Turki ke berbagai negara salah satunya etnis muslim uighur yang bermigrasi ke wilayah Xinjiang, Tiongkok. Xinjiang adalah daerah yang berhubungan dengan negaranegara Islam tetangga dalam banyak aspek, seperti asal etnis, agama, ekonomi, budaya, dan adat istiadat, tetapi tidak pernah memisahkan diri dari otoritas sentral dalam cara apapun. Hubungan ini terjalin melalui berbagai cara, seperti dakwah, perang agama terhadap Budhisme dan dukungan politik, di sinilah Islam menyebar. Sebelum tinggal di Turkistan Timur, Barat Tiongkok (teritorial Xinjiang saat ini), Uighur adalah kumpulan dari beberapa kabilah (suku) yang berpindah-pindah di Mongolia. Mereka

sampai ke daerah ini setelah menguasai kabilah Mongolia serta perjalanan mereka ke arah Barat Laut Tiongkok pada abad 8 Hijriah. Selain muslim uighur, terdapat etnis muslim lain yang lebih besar yaitu muslim Hui yang berasal dari hasil asimilasi dan merupakan keturunan dari suku Han dengan bangsa Persia dan Arab sejak zaman Dinasti Tang. Kedekatan hubungan antara muslim Hui dengan etnis Han membuat ketimpangan sosial dan juga memicu konflik. Kedua etnis muslim tersebut berselisih karena faktor ekonomi dan kultural. (Anugerah, 2018).

Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan memberi perlakuan berbeda terhadap etnis Uighur, ketimbang Hui yang sama-sama Muslim. Suku Hui dibebaskan berpuasa saat Ramadan, bebas berhaji, beribadah secara berjemaah dan membangun masjid, mendirikan sekolah agama serta mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup dengan mapan. Sedangkan bagi orang Uighur justru sebaliknya. Pada 11 September 2001, rezim Tiongkok mengintensifkan pengejaran terhadap orang Uighur dan berhasil membawa beberapa orang Uighur, terutama dari Pakistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan, di bawah apa yang disebut “Kampanye Internasional Melawan Terorisme” karena dianggap rentan terpapar radikalisme. Sebab, sejumlah kelompok perwakilan etnis Uighur dianggap tidak sejalan dengan pemerintah Tiongkok. Organisasi yang menjadi target Tiongkok adalah Kongres Uighur Dunia (WUC) dan Gerakan Kemerdekaan Turkestan Timur (ETIM). Yang terakhir bahkan dianggap sebagai kelompok teroris oleh Tiongkok. Dengan gelombang kelompok radikal seperti Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang dikhawatirkan tersebar di kalangan Uighur, pemerintah Tiongkok dirasa wajar jika merasa cemas. Meski sampai saat ini belum ada data pasti berapa jumlah etnis Uighur yang bergabung dengan ISIS (Nugroho, 2018).

Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim uighur adalah pelanggaran yang ada di Tiongkok lebih tepatnya di daerah Xinjiang. Awal mula terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok ini adalah karena adanya

dugaan terorisme dan pemberontakan yang dituduhkan kepada kaum muslim Uighur. Sejumlah serangan teroris terjadi selama satu dekade terakhir, dan pemerintah menuding separatis di Xinjiang dan sekitarnya adalah pelakunya. Sekitar 200 orang, sebagian besar warga Etnis Han tewas dalam kerusuhan di Urumqi (CNN, 2018).

Belum lama setelahnya terjadi serangan penikaman yang menewaskan lima orang muslim uighur yang disusul penggrebakan besar-besaran oleh pemerintah Tiongkok terhadap sesuatu yang biasa mereka sebut sebagai kaum ekstremis dan separatis. Sejumlah mantan tahanan mengatakan tentang penyiksaan fisik maupun psikologis yang mereka alami di kamp-kamp penahanan. Seluruh keluarga mereka lenyap, para tahanan disiksa secara fisik serta mentalnya dan juga seperti berlangsungnya pengawasan yang sangat ketat terhadap warga muslim uighur (Hughes R., 2018).

Menurut Human Rights Watch, suku Uighur dipantau secara sangat ketat. Mereka harus memberikan sampel biometrik DNA dan terjadi penangkapan terhadap mereka yang memiliki kerabat di berbagai negara yang dianggap oleh Tiongkok sebagai negara sensitif dalam artian terdapat kelompok-kelompok pemberontak atau bahkan teroris. PBB mengatakan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok Muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat dan di sana mereka menjalani program reedukasi, atau pendidikan ulang. Pendidikan ulang yang dimaksudkan untuk memurnikan kembali fikiran mereka yang diduga oleh Tiongkok sudah terkontaminasi dengan fikiran yang dapat menjadikan mereka pemberontak dan hal itu dianggap mengancam Tiongkok sendiri. Orang-orang di kamp-kamp itu dipaksa belajar bahasa Mandarin, diajarkan untuk mengecam, bahkan meninggalkan keyakinan iman mereka (BBC, 2018).

Aparat Tiongkok juga melakukan pembatasan praktek keagamaan, melakukan indoktrinasi politik, hingga memasang kamera pengenalan identitas wajah bagi warga Uighur. Jutaan orang lebih telah diawasi oleh kamera pengenalan wajah, pemindai *smartphone*, dan patroli polisi di setiap kesempatan.

Beberapa orang harus menampung petugas pemerintah untuk tinggal di rumah mereka, dikirim untuk menilai kesetiaan mereka terhadap negara. Tiongkok menyebut langkah-langkah ini penting setelah serangan teroris yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir oleh para fanatik Uighur (BBC, 2018).

Pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok mendapat berbagai kecaman yang jelas menentang tindakan tidak manusiawi tersebut. Kepala badan hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta agar pemerintah Tiongkok membuka akses bagi stafnya dan mengizinkan tim monitor masuk ke Tiongkok yang bertujuan untuk mengecek tuduhantuduhan terkait penerapakamp-kamp bagi muslim uighur dengan indoktrinasi politik yang tentunya sangat mengkhawatirkan (Riza, 2018).

Beberapa pemerintah dari negara-negara barat mengirim duta besar mereka ke Tiongkok untuk mempertanyakan tentang hak asasi manusia. Duta besar dari negara-negara Barat yang dipimpin oleh Kanada datang bersama-sama untuk melawan Tiongkok atas penindasan massal terhadap kaum Muslim Uighur. Utusan duta besar meminta bertemu dengan ketua partai komunis di Xinjiang, Chen Quanguo. Chen dipindahkan dari tibet untuk mengawasi kamp-kamp di mana mungkin sejuta Uighur telah dikirim ke sana untuk melakukan transformasi melalui pendidikan, banyak dari mereka ditahan untuk waktu yang tidak terbatas dengan tanpa adanya pengadilan (Economist, 2018).

Selain itu Amerika Serikat turut ikut mengecam tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok. Amerikat Serikat telah mempertimbangkan untuk memberikan sanksi terhadap pejabat senior Tiongkok dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas muslim Uighur. Pihak Amerika Serikat sendiri akan memberikan sanksi berdasarkan Global Magnitsky Act, Undang-Undang federal yang memungkinkan pemerintah AS menargetkan pelanggar hak asasi manusia di seluruh dunia. Hukumannya adalah dengan membekukan aset,

larangan perjalanan, dan larangan orang Amerika melakukan bisnis dengna mereka (Birdieni, 2018).

Hal yang berbeda diberikan oleh Negara-Negara muslim dunia, dalam konflik muslim uighur ini negara-negara Islam belum ada yang berani menentang secara langsung Tiongkok dikarenakan adikuasa yang dimiliki oleh Tiongkok terutama dalam hal perdagangan yang tentunya setiap negara harus tetap mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu dan mengambil keputusan yang tidak membahayakan. Beberapa negara mengatakan tidak ingin ikut campur dan mendapat balasan dari Tiongkok. Bahkan tidak satupun pemerintah negara dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) secara terang-terangan memprotes Tiongkok atas penindasan mereka yang mengejutkan terhadap Muslim. Salah satunya yaitu Pakistan yang justru membela Tiongkok dengan mengatakan bahwa media yang dimiliki oleh negara-negara barat menjadikan kabar atau berita tentang uighur menjadi sesuatu yang sensasional.

Sebagai sesama muslim seharusnya negara islam memberika kontibusi dalam konflik ini dikarenakan kesamaan identitas atau keyakinan yang jelas mereka tahu itu merupakan hal yang tidak dapat di ganggu atau bahkan dipaksakan untuk ditinggalkan. Sebagai sesama juga rasa peduli seharusnya tercipta sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia hidup dan diciptakan menjadi makhluk sosial yang mana tentu membutuhkan satu sama lain dan tidak dapat hidup sendiri (Richardson, 2018).

Salah satu alasan negara muslim tidak ikut mengkecam kebijakan Tiongkok menurut Pakar kebijakan Tiongkok Michael Clarke dari Australian National University (ANU), kekuatan ekonomi Tiongkok dan takut mendapat balasan diduga menjadi faktor besar dalam diamnya negara berpenduduk mayoritas Islam untuk menyikapi isu Uighur. Selain itu, ada pula faktor pertimbangan politik, ekonomi dan kebijakan luar negeri. Investasi Tiongkok di negara-negara Timur Tengah dari kurun waktu 2005 hingga tahun 2018 telah berjumlah AU\$ 144,8 miliar. Sementara di Malaysia dan

Indonesia, jumlahnya AU\$ 121,6 miliar pada periode yang sama, menurut lembaga think tank American Enterprise Institute. Beijing telah banyak berinvestasi di industri minyak dan gas milik negara Arab Saudi dan Irak, serta menjanjikan investasi berkelanjutan di seluruh Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tampaknya hal ini yang membuat Tiongkok berhasil menghentikan negara-negara ini secara terbuka mengkritik Beijing terkait Uighur (Merdeka, 2018).

Namun sikap lain diambil oleh Turki, Turki secara terang-terangan mengkecam tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok terhadap kaum Muslim Uighur. Turki beranggapan tindakan yang dilakukan Tiongkok tersebut telah melanggar norma manusiawi dan mengambil secara paksa kebebasan individu. Walaupun Turki dan Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir berjanji untuk bekerja sama dalam upaya keamanan dan melawan terorisme, menurut para ahli hubungan antara keduanya tidak diimbangi dengan rasa saling percaya. Hubungan antara Ankara dan Beijing menjadi tegang karena Turki mendukung kelompok-kelompok yang memerangi Presiden Suriah Bashar al-Assad sekutu Tiongkok dan menampung pengungsi Uighur (Indonesia, 2017).

Kelompok hak asasi manusia telah lama menuduh Tiongkok menindas sekitar berjuta-juta orang Uighur dengan pembatasan bahasa, budaya dan agama yang parah dan terus menerus mengobarkan kebencian dan radikalisasi. Dalam beberapa tahun terakhir ribuan orang Uighur telah meninggalkan Tiongkok untuk mencari suaka di Turki, banyak diantara mereka pergi ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok militan Islam atau hanya untuk menghindari penganiayaan dan menemukan rumah baru. Dengan banyaknya yang menentang dan tidak tinggal diam Tiongkok telah mendesak sekutunya termasuk Rusia dan Suriah untuk berbagi informasi tentang militan Uighur yang berperang di Suriah dan membantu mencegah kepulangan mereka untuk menyerang Tiongkok (Indonesia, 2017).

Ditambah lagi dengan adanya berita kematian penyair oleh salah satu orang uighur Abdurehim Heyit, yang hanya dijatuhi

hukuman delapan tahun penjara karena salah satu lagunya hal tersebut memicu kemarahan publik di Turki, memaksa pemerintah untuk bereaksi. Belum lagi tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap muslim uighur juga mendapat kecaman dari rakyat Turki yang ditunjukkan dengan demonstrasi besarbesaran untuk mendukung muslim uighur. Sentimen anti Tiongkok ini berlangsung selama 10 hari. Bahkan demonstrasi tersebut juga menyerang restoran-restoran Tiongkok dan juga penyerangan terhadap turis-turis yang disangka berasal dari Tiongkok yang sedang berwisata bahkan diantaranya terluka (BBC, 2015). Kementerian Perdagangan dan Industri Turki juga menyerukan akan memboikot produk-produk yang diimpor dari Tiongkok karena dianggap negara yang memproduksi tidak menghormati nilai-nilai kemanusiaan jadi harus mempertimbangkan lagi untuk konsumsi rakyatnya. (Fermalasari, 2015).

Turki mengatakan akan memprotes kebijakan Tiongkok yang secara paksa memenjarakan lebih dari satu juta Muslim Uighur. Turki menyebutnya sebagai tindakan buruk yang sangat tidak berperasaan bagi kemanusiaan. Pernyataan dan perubahan sikap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuat beijing marah (Dayana, Cina Tepis Tudingan Soal Kematian Abdurahman Heyit di Xinjiang, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Turki Merespon dan Membantu Muslim Uighur dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Tiongkok?

C. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu upaya untuk menjawab suatu pertanyaan mengapa dari sebuah rumusan masalah (mas'ood, 1994) Selain menggunakan teori, bisa juga menggunakan

konsep ataupun model. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan konsep Neo Ottomanisme.

Konsep Neo Ottomanisme merupakan soft diplomacy yang dimiliki Turki saat ini. Di dalam buku *Turkey's Middle East Policies: Between Ottomanisme and Kemalisme* Tahun 2008 yang ditulis oleh Omer Taspinar mengatakan terdapat tiga indikasi yang dapat menjelaskan konsep Neo Ottomanisme. Pertama yaitu Turki ingin mengembalikan citranya sebagai negara islam yang memiliki kekuatan otoriter seperti pada masa kejayaan Turki Usmani. Dengan adanya keinginan Turki tersebut Turki tidak merubah citra Turki modern menjadi Turki pada masa Turki Usmani yang dulu justru Neo Ottomanisme tetap melanjutkan kebijakan tentang sistem islam yang moderat dan sekuler pada keperluan domestik serta meningkatkan perhatian terhadap isu-isu global.

Turki memulai dengan menunjukkan perannya seperti mengambil posisi kepemimpinan dalam Organisasi Kerjasama Islam, menghadiri beberapa konferensi Liga Arab, menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Iran, Irak, dan Suriah juga meningkatkan ekonomi, politik, dan diplomatiknya hubungan dengan sebagian besar negara Arab dan Muslim. Dengan contoh juga seperti halnya pada kasus muslim uighur hanya Turki negara islam yang berani menentang dan dengan aktif merespon konflik tersebut. Dapat ditunjukkan bahwa Turki ingin menjadi negara yang paling kuat di antara negara-negara islam sama halnya ketika kejayaan Turki Usmani (Taspinar, 2008, hal. 2).

Yang kedua yaitu Turki yang memiliki percaya diri bahwa negaranya mampu melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa Neo Ottomanisme memiliki tujuan untuk menjadikan Turki sebagai negara yang kuat dan mampu diandalkan dalam berbagai aspek seperti aspek politik, ekonomi, dan budaya. Berbeda dengan Kemalisme Ideologi yang idusung oleh Mustafa Kemal yang justru menganggap bahwa Neo Ottomanisme membahayakan kepentingan nasional Turki dalam memperluas hubungan

terhadap Timur Tengah dan Asia. Kemal lebih memusatkan perhatiannya pada negara-negara barat saja. Tentu hal tersebut justru yang membuat kepentingan nasional Turki tidak aman karena hanya memusatkan perhatian pada satu sisi saja (Taspinar, 2008, hal. 15).

Yang ketiga, selain merangkul negara-negara islam seperti Timur Tengah Neo ottomanisme juga ingin Turki merangkul negara-negara barat untuk menjadi mitranya yang mana mengingat julukan Turki dengan *The sick man of Europe* bahwa Turki merupakan bagian dari Eropa Barat. Dengan gambaran Turki harus memposisikan dirinya atau bermuka dua. Turki memiliki warisan-warisan ottoman yang bukan berarti berencana mengislamkan Turki dan kebijakan luar negeri Turki. Turki ingin berlaku adil terhadap negara islam dan negara barat dengan memposisikan dirinya sebaik mungkin (Taspinar, 2008, hal. 15-16).

Sedangkan pada sudut pandang lain Turki menggunakan neo ottomanisme dengan landasan konstruktivisme yang mana dapat dijadikan salah satu alasan Turki untuk membela muslim uighur karena persamaan identitas. Jika realis menekankan pada dimensi material berupa distribusi kapabilitas antar negara, konstruktivis menekankan pada dimensi tidak tampak berupa distribusi pengetahuan atau intersubyektivitas (*shared understanding*) antar negara. Salah satu konsep kunci konstruktivis untuk memahami fenomena hubungan internasional adalah identitas. Menurut Alexander Wendt dalam buku *Social Theory Of International Politics* Tahun 1999, identitas lebih dulu membentuk kepentingan nasional suatu negara. Dalam konteks negara, identitas biasanya merujuk pada serangkaian sejarah yang dimiliki negara pada masa lampau yang didasari oleh nilai-nilai tertentu yang dianut sebagai pedoman atau panduan dalam bersikap dan bertindak. Sebagaimana Turki, negara dua benua ini memiliki sejarah panjang pada masa Turki Utsmani dahulu. Keadaan tersebut membuat Turki saat ini memiliki nilai-nilai yang telah terinternalisasi ke dalam masyarakatnya. Meskipun demikian, agen (aktor) dalam pandangan konstruktivis pada dasarnya

juga memiliki peranan dalam mengubah struktur yang membentuk tindakan atau kebijakan negara. Turki Usmani melahirkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan dengan identitas dan kepentingannya seperti menciptakan perdamaian dan melindungi muslim yang tertindas sesuai dengan respon Turki yang aktif dalam konflik muslim uighur. Secara singkat identitas yang digunakan pada masa Turki Usmani dapat disebut dengan Sufisme atau Ottomanisme. (Hidayati, 2018).

D. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang hendak dijawab serta kerangka pemikiran berupa teori konstruktivisme di atas maka didapat hipotesa sebagai berikut:

1. Turki berupaya untuk mengembalikan citranya sebagai pemimpin negara islam.
2. Turki bertanggung jawab membantu muslim uighur dalam pelanggaran HAM yang dilakukan Tiongkok sebagai negara muslim.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana respon aktif Turki dalam membela hak asasi manusia yang dilanggar oleh Tiongkok terhadap muslim Uighur.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari tak terarahnya tulisan ini serta guna membatasi pembahasan, maka penulis perlu untuk membuat batasan dalam penelitian atau batasan dalam pembahasan. Bahasan topik dari penulisan ini adalah peran Turki dalam pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok terhadap muslim uighur. Sedangkan batasan waktu kisaran tahun 2018. Jangkauan yang diambil penulis merujuk kepada peran negara sebagai aktor dan sebagai update dari perkembangan penanganan kasus diskriminasi terhadap kaum muslim uighur di Tiongkok. Tujuan dari dilakukannya pembatasan ini adalah

agar penulis dapat fokus pada inti permasalahan serta mempermudah dalam pengumpulan data penelitian.

G. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat studi pustaka untuk lebih mengakuratkan penelitian dari sisi keilmuan. Metode ini dilaksanakan dengan topik permasalahan yang diangkat melalui penelitian terhadap buku, tulisan, artikel skripsi sebelumnya. Penulis juga mencari data yang relevan yang bersumber dari media elektronik yang reliabel.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun saling berkaitan. Yang terdiri dari beberapa bab.

Pada bab yang pertama penulis ingin menyampaikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab yang kedua berisi mengenai perkembangan isu HAM muslim uighur di Xinjiang dan tindakan atau pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Pada bab yang ketiga penulis akan memaparkan tentang respon dan pembelaan HAM terhadap Muslim Uighur oleh Dunia Internasional terutama Turki dalam permasalahan pelanggaran yang dilakukan Tiongkok. Pada bab ke empat berisi tentang tujuan pembelaan yang dilakukan oleh Turki dan upaya yang dilakukan Turki untuk muslim uighur di Xinjiang dan pada bab ke lima yang terakhir yaitu pemaparan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.